



PROSIDING
CALL FOR PAPER

JAKARTA, 7 JULI 2012



CALL FOR PAPER & KONFERENSI NASIONAL

KOMUNIKASI ANTI KORUPSI

KOMUNIKASI DAN PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA

JAKARTA, 7 JULI 2012

SAMBUTAN

Dr. Farid Hamid, M.Si.
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Komunikasi
Program Pascasarjana
Universitas Mercu Buana
Jakarta

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat partisipan pemakalah, peserta, delegasi dan tamu undangan Seminar Nasional dan Call for Papers Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia 2012.

Atas nama civitas akademika Universitas Mercu Buana, khususnya Program Studi Magister Ilmu Komunikasi mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan

pemakalah, peserta, delegasi serta tamu undangan Seminar Nasional dan Call for Papers: Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia 2012 di Kampus Meruya Universitas Mercu Buana - Jakarta.

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kondisi itu telah menyadarkan semua pihak agar pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara luar biasa. Dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, upaya pencegahan dan pemberantasan sudah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal. Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia lambat, 2,8 pada tahun 2008 menjadi 3,0 di tahun 2011.

Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Penyebab korupsi sebenarnya sangat beragam, namun akar korupsi muncul jika ada niat dan ada kesempatan. Artinya bergantung pada diri pribadi seseorang. Niat muncul sebagai dampak dari pendidikan dalam arti luas, baik itu sosialisasi di tingkat keluarga, masyarakat, pendidikan formal, hingga suasana dan interaksi di lingkungan pekerjaan. Sedangkan kesempatan terkait soal sistem yang bisa mencegah dan memaksa setiap individu agar tidak melakukan tindak korupsi.

Dalam konteks sistem memang akan sangat kompleks, di dalamnya ada subsistem hukum, politik, birokrasi, ekonomi, sosial budaya termasuk pendidikan. Di sinilah fungsi dunia pendidikan agar bisa mengembangkan sistem yang andal dan dapat mencegah atau menghindarkan perilaku korup.

Sistem pendidikan pada dasarnya akan dapat memengaruhi perwujudan integritas seseorang. Melalui pembiasaan atas penghargaan terhadap nilai integritas (kejujuran), konsistensi, dan tanggungjawab, maka setiap individu memiliki peluang dan wahana dalam mengembangkan diri menjadi manusia Indonesia yang memiliki integritas.

Penyelenggaraan Seminar Nasional dan Call for Paper: Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia ini sangat penting di tengah penurunan penilaian rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Data Lembaga Survei Indonesia mengenai Kepercayaan Publik pada Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2011, penilaian negatif hampir merata di seluruh tingkat pendidikan, bukan hanya di kalangan yang lebih terpelajar. Ini artinya, penilaian negatif tersebut sudah sangat masif. Secara lebih khusus, penilaian rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi semakin menurun.

Melalui Seminar dan Call for paper ini diharapkan ilmu komunikasi bisa memotret kasus-kasus korupsi yang ada di wilayah kajian komunikasi, baik itu persepektif keilmuan, etika periklanan, *public relations* dan kajian-kajian media. Melalui kajian dari berbagai ahli, praktisi, akademisi dan mahasiswa, diharapkan ilmu komunikasi bisa memberikan kontribusi untuk memetakan permasalahan sekaligus menawarkan sebuah solusi bagi setiap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan Kontribusi Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta dalam mengembangkan perguruan tinggi sebagai sub sistem dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional.

Dalam tataran minimal, paling tidak melalui diskusi dan berbagi ide dalam acara ini, *mindset* dan *culture set* di kalangan civitas akademika akan senafas dengan semangat pemberantasan korupsi. Hasil yang jauh lebih besar, penyelenggaraan seminar berserta call for paper akan dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semoga.

Jakarta, Sabtu 7 Juli 2012
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iv
RUNDOWN ACARA SEMINAR DAN CALL FOR PAPER.....	v
BAGIAN I	
KORUPSI DI INDONESIA	
DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI.....	1
Korupsi Dalam Kajian Komunikasi	
Rini Rinawati	2
Korupsi: Cara Pandang Ilmu Komunikasi	
Teguh Ratmanto.....	13
Korupsi Dalam Pandangan Teori Disonansi Kognitif	
Tuti Widiastuti.....	22
Korupsi: Sebuah Arkeologi Komunikasi Politik di Indonesia	
S Kunto Adi Wibowo.....	35
Gerakan Anti Korupsi di Kabupaten Muna Dalam Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Jamkesmas (Suatu Tinjauan Komunikasi Kesehatan)	
Abdul Rahim Sya'ban.....	47
Meretas Jalan Menuju Masyarakat Anti Korupsi: Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi	
Prima Mulyasari Agustini.....	59
BAGIAN II	
ETIKA PERIKLANAN DAN GERAKAN ANTIKORUPSI	72
Komunikasi yang Koruptif	
Bambang Sukma Wijaya	73
Komunikasi dan Integritas Politik	
Dedi Kurnia Syah Putra.....	88
Kuasa Simbolik Komunikasi Anti Korupsi (Analisis Semiotik Sosial Zona Anti Korupsi di Lembaga Pemerintah)	
Dewi S. Tanti dan MT Hidayat.....	105
Integritas Kepala Sekolah Dilihat Dari Aspek Kognisi, Afeksi dan Konasi Mengenai Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
Kiki Zakiah.....	113
BAGIAN III	
PROFESIONALISME DAN ETIKA <i>PUBLIC RELATIONS</i>	
DALAM AKSI ANTIKORUPSI	127
Konflik Antara Reputasi Organisasi Partai Demokrat dengan Publiknya (Studi Kasus Tentang Isu Korupsi di Partai Demokrat)	
Neni Yulianita	128
Dinamika Korupsi dalam Birokrasi	
Suwandi Sumartias	145
Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran Moral (Pendidikan Anti Korupsi/PAK) di Sekolah	
Desiree, dkk	160

Sikap Perilaku Korupsi di Indonesia: Perspektif Etika dan Profesionalisme <i>Public Relations</i>	
Elvinaro Ardianto	171
Membangun Integritas pada Pelayanan Kehumasan	
Nurdin Abd. Halim	190
Minimnya Penerapan Etika PR Dalam Organisasi di Indonesia	
Studi Kasus : Peran PR Sebagai Spokeperson pada Kasus Korupsi	
Marsefio Ahsye Luhukay	208
BAGIAN IV	
PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DALAM MEDIA	220
Petarungan Berita di Media Massa dalam Pemberantasan Korupsi	
Dicky Andika	221
Investigasi Media Massa: Mengungkap dan Mencegah Korupsi	
Ira Dwi Mayangsari,	234
Paradoks Perayaan “Antikorupsi” di Televisi	
Syaiful Halim	249
Media Massa dan Pemberantasan Korupsi: (Studi Terhadap Konstruksi Karakter Koruptor Kader Partai Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan di Kompas <i>Online</i>)	
Ahmad Toni	271
Perempuan dan Kasus Korupsi (Analisis Framing Pemberitaan Kasus Angelina Sondakh dalam Harian Kompas dan Suara Merdeka)	
Mite Setiansah	284
BAGIAN V	
MEDIA MASSA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	296
Pers Nasional, Pilar Satu-satunya yang Konsisten Anti-Korupsi	
Atmadji Sumarkidjo	297
<i>The Mass Media Role In Fighting Corruption In Indonesia</i>	
Rita Destiwati dan Junardi Harahap	317
Peranan Media Massa dalam Membangun Masyarakat Antikorupsi	
Dedeh Fardiah	333
Reduksi Persoalan Korupsi oleh Media Massa dalam Perspektif Gender	
Putri Aisyiah Rachma Dewi	346
Dekonstruksi Media sebagai “ <i>New Social System</i> ” dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	
M Isnaini	357
Permasalahan yang Membelit Media dalam Melawan Korupsi Politik	
Andy Corry Wardhani	365
“ <i>Optimalisasi Sanksi Sosial</i> ” sebagai Alternatif Penanggulangan Korupsi di Indonesia Melalui Media Lokal	
Dewi Anggraini dan Musdalifah Bahmid	377
Jurnalisme <i>Online</i> : Mampukah Berantas Korupsi?	
Monika Sri Yuliarti	390
Konstruksi Realitas Pemberantasan Korupsi dan Sublimasi Makna Aktifitas Media: Praktek Komunikasi dan Manajemen Perubahan Berkelanjutan	
Henny Gusfa	399
TENTANG PENULIS	404

**ACARA SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
KOMUNIKASI DAN PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA**

TIME		DESCRIPTION	ROOM
07:30	09:05	Register and snacks	AULA REKTORAT
09:05	09:21	OPENING PERFORMANCE SPEECH KETUA PANITIA SPEECH DIREKTUR PASCA SARJANA SPEECH REKTOR UMB	
09:21	12:00	SEMINAR “Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia ” Sesi 1 - Keynote speaker MENPAN & RB Azwar Abubakar Sesi 2- Panelist Discussion (4 panelist) - PANELIST 1 : KPK - PANELIST 2: PPAK - PANELIST 3: WIJAYANTO - PANELIST 4: BAHCTIAR ALY	AULA REKTORAT
12:00	12:19	Penyerahan cendera mata kepada keyonote speaker & Panelist Foto bersama	AULA REKTORAT
12:19	12:25	DOORPRIZE Akustik Perform	
12:25	13:25	Break ISHOMA	
13:55	16:00	DISKUSI PANEL/CALL FOR PAPER	
		KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI ETIKA PERIKLANAN DAN GERAKAN ANTIKORUPSI PROFESIONALISME DAN ETIKA <i>PUBLIC RELATIONS</i> DALAM AKSI ANTIKORUPSI PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DALAM MEDIA MEDIA MASSA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	R. 203 R. 211 R. 202 R. 209 AULA

PEREMPUAN DAN KASUS KORUPSI

(Analisis Framing Pemberitaan Kasus Angelina Sondakh dalam Harian Kompas dan Suara Merdeka)

Mite Setiansah

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed

e-mail: mite.setiansah@unsoed.ac.id

Abstrak

Perempuan dan korupsi adalah wacana baru yang hangat diperbincangkan setelah munculnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan perempuan belakangan ini. Sorotan terhadap perempuan pelaku korupsi semakin menguat, manakala politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh dinyatakan sebagai tersangka pada Februari 2012 dan kemudian ditahan KPK pada 27 April 2012. Kasus Angie memiliki keunikan sendiri karena Angie bukan hanya seorang politisi, ia telah lebih dahulu dikenal sebagai selebriti, mantan putri Indonesia. Kasus Angie memiliki nilai berita yang luar biasa, tidak hanya bagi media berita namun juga bagi media hiburan. Sebagai jembatan antara realitas sosial dengan khalayak, media memainkan peran yang sangat penting. Konstruksi realitas yang dihadirkan media menjadi sarana khayalak dapat memahami sebuah peristiwa, termasuk kasus Angie. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi kasus ini? Bagaimana pula media merepresentasikan perempuan dalam kasus korupsi? Dan bagaimana peran media dalam pemberantasan kasus korupsi. Dengan menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman, tulisan ini mencoba untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Kata kunci: Pemberitaan, perempuan, kasus korupsi

Pendahuluan

Berita yang menyentak publik mencuat pada 3 Februari 2012, Angelina Sondakh, selebritis, mantan Putri Indonesia 2001, dan politisi Partai Demokrat dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi. Angelina yang biasa dipanggil Angie disebut-sebut menerima suap dalam pembahasan anggaran pembangunan wisma atlet SEA Games yang merupakan proyek kemenporan dan anggaran pengadaan alat pendidikan di sejumlah universitas yang merupakan proyek kemendiknas (sekarang kemendikbud).

Media massa nasional baik media berita maupun hiburan pun secara gencar memberitakan kasus Angie tersebut. Bila dicermati lebih lanjut,

pemberitaan kasus hukum yang melibatkan perempuan memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pemberitaan kasus yang sama dengan pelaku laki-laki. Pada umumnya, pemberitaan kasus hukum yang melibatkan laki-laki memunculkan 5W+H yang relative fokus pada kasusnya sendiri. Sementara kasus hukum yang melibatkan perempuan cenderung diwarnai unsur stereotype gender yang selama ini melekat pada perempuan. Penelitian Mite Setiansah (2009: 152) yang menganalisis kasus beredarnya video porno yang melibatkan Yahya Zaini dan Maria Eva, menyebutkan bahwa dalam merepresentasikan atau membingkai perempuan, Kompas maupun Suara Merdeka masih terpancang pada pola patriarki yang masih kuat dalam melingkupi dunia media. Dalam kasus Maria Eva dan Yahya Zaini, kedua media cenderung memberitakan kasus ini dalam bingkai yang mendiskreditkan perempuan. Ilustrasi lain adalah pemberitaan kasus Malinda Dee. Media berita banyak tergoda untuk lebih mengeksplorasi sosok Malinda maupun kehidupan pribadinya. Angelina Sondakh dalam hal ini juga merupakan sosok yang istimewa. Ia bukan hanya seorang politisi, melainkan telah lebih dulu dikenal sebagai selebriti, mantan Putri Indonesia, dan mantan istri aktor yang juga anggota dewan, alm. Adjie Massaid,

Mantan Putri Indonesia dan kasus korupsi tentu saja menimbulkan situasi yang kontradiksi. Putri Indonesia selama ini identik tidak hanya dengan cantik (*beauty*) melainkan juga cerdas (*brain*) dan berperilaku baik (*behavior*). Tindak korupsi tentu saja melenceng jauh dari imej seorang Putri Indonesia. Di sinilah letak nilai berita kasus ini dibanding kasus korupsi yang melibatkan perempuan sebagai pelaku lainnya. Kasus ini mengandung unsur *actions of the elite (public figure)*, *unexpectedness*, dan *negativity* (Burton, 2000: 127). Kasus Angie tidak hanya menarik perhatian media berita, melainkan juga media hiburan. Media tidak hanya memuat berita kasus korupsinya, melainkan juga memunculkan liputan

tentang gossip seputar hubungan Angie dengan pihak ketiga, hobby belanja Angie, gaya busana dan penampilan Angie sebagai Putri Indonesia.

Orientasi media hiburan (*entertaint*) berbeda dengan media berita (*information*). Hakikatnya, muatan media hiburan lebih bersifat fiksional sementara media berita lebih bersifat faktual. Media berita diharapkan mampu merefleksikan realitas sosial yang ada di masyarakat. Pada umumnya, publik tidak secara langsung berada dalam sebuah realitas sosial. Mereka memahami sebuah realitas sosial melalui kepingan-kepingan realitas yang dihadirkan oleh media massa. Media massa menjadi jembatan antara *the world outside* dengan *the pictures in our heads*. Oleh karena itu pemahaman dan penilaian publik atas sebuah realitas sosial sangat tergantung pada media massa. Demikian pula dengan pemahaman publik atas kasus perempuan dan korupsi. Frame media turut menentukan bagaimana publik “harus” memahami kasus-kasus tersebut.

Berangkat dari uraian di atas maka dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana harian Kompas dan Suara Merdeka sebagai media berita mengkonstruksi kasus korupsi Angelina Sondakh?
2. Bagaimana harian Kompas dan Suara Merdeka merepresentasikan perempuan dalam kasus korupsi?
3. Bagaimana peran media berita dalam pemberantasan korupsi?

Metode

Untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif tentang frame Kompas dan Suara Merdeka dalam mengkonstruksi kasus korupsi yang melibatkan Angelina Sondakh, penulis menggunakan metode analisis framing. Metode analisis *framing* pada dasarnya merupakan sebuah cara untuk melihat cara bercerita media atas sebuah peristiwa (Eriyanto, 2002: 10). Sumber data utama adalah kliping berita

tentang kasus korupsi yang menimpa politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang dimuat dalam harian umum Kompas dan Suara Merdeka tanggal 28 April-6 Mei 2012. Dalam penelitian ini, model analisis framing yang digunakan adalah model analisis framing Robert N. Entman. Untuk mengetahui frame berita, Entman mengelompokkan unit analisisnya dalam empat kategori, yaitu:

Tabel 1. Perangkat *framing* Robert N. Entman

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah
<i>Make moral judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto (2002: 189)

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua surat kabar sebagai subyek penelitian, yaitu Harian Umum Kompas dan Suara Merdeka. Kompas adalah surat kabar nasional yang memiliki tiras terbesar di Indonesia saat ini, bahkan sepanjang sejarahnya, Kompas pernah mencapai oplah 700.000 eksemplar yang merupakan tiras terbesar di Asia. Dengan posisinya sebagai koran terbesar maka tidak heran bila Kompas juga dikenal sebagai koran yang memiliki gaya penulisan yang penuh kehati-hatian bahkan cenderung konservatif (Setiansah, 2009:140).

Koran kedua yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Suara Merdeka. Sejak awal pendiriannya, koran ini sudah ditujukan untuk menampung aspirasi dan suara rakyat yang baru merdeka. Visi itu juga menjadi pertimbangan ketika memutuskan nama yang dipakai untuk koran tersebut. Hal tersebut juga

yang kemudian nampaknya membuat Suara Merdeka sering tampak sebagai koran yang secara ideologis lebih condong pada ideologi pasar, sekedar mengikuti selera dan permintaan khalayak (Setiansah, 2009:141).

Analisis Framing Kompas dan Suara Merdeka

Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2002:188). Berikut hasil analisis framing pemberitaan kasus Angie di harian Kompas dan Suara Merdeka:

Tabel. 2 Analisis framing pemberitaan kasus Angie dalam harian Kompas dan Suara Merdeka

Perangkat framing	Kompas	Suara Merdeka
<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Angie terlibat kasus korupsi (menerima suap dalam pembahasan anggaran di Banggar DPR) dalam pembangunan wisma atlet SEA Games (proyek Kemenpora) dan pembangunan sarana pendidikan sejumlah universitas (proyek kemendikbud)	Angie menerima sejumlah uang (suap) dalam pembahasan anggaran wisma atlet seagames kemenpora dan pengadaan alat laboratorium universitas di kemdiknas
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Angie tidak bekerja sendiri, ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat	Angie tidak berperan sendiri; ada nama-nama lain yang turut terlibat
<i>Make moral judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Angie orang yang rasional; Angie diminta kooperatif	Angie orang yang rasional;
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Kasus Angie ditangani KPK; Angie tidak perlu diberi perlakuan khusus	Kasus Angie ditangani secara objektif

Sumber: hasil olahan peneliti

Pembahasan

Analisis Framing Kompas

Frame berita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. *Frame* berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, symbol, citra yang ada dalam narasi berita. Karenanya, *frame* dapat dideteksi dan diselidiki dari kata, citra, dan gambar tertentu yang memberi makna tertentu dari teks berita (Eriyanto, 2002: 189).

Kompas dalam membangun *frame* berita terkait dengan kasus Angie ini antara lain dilakukan dengan menampilkan berita Angie sebagai *headline* pada beberapa terbitannya, misal pada Sabtu, 28 April 2012, Kompas menampilkan berita Angie sebagai di halaman muka atas lengkap dengan foto *full color*, dengan *lead* warna merah *Korupsi Pembahasan Anggaran*, dan judul berita *Angelina Dimasukkan ke Rumah Tahanan KPK*. Pada hari yang sama di halaman 2 atas, Kompas kembali memunculkan berita Angie, juga dengan foto berwarna di kanan atas. *Lead* dengan font color merah kembali digunakan *Tersangka Wakil Rakyat* dengan judul *Senyum Manis Tahanan*.

Penempatan kasus sebagai *headline*, atau di halaman lain tetapi di bagian sepertiga atas koran, penggunaan foto berwarna, dan juga *font* yang berwarna, Kompas ingin mengarahkan perhatian pembaca bahwa kasus ini penting untuk diperhatikan. Di sisi lain, pemunculan dua berita tentang Angie pada hari yang sama, menunjukkan ironi bahwa Angie, sang tahanan korupsi adalah memang sosok yang istimewa sehingga tersenyumnyanya Angie saat ditahan pun menjadi hal yang dianggap penting untuk diperhatikan. Alam bawah sadar masyarakat

diarahkan untuk memperhatikan senyum itu. Sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang yang diposisikan sebagai tahanan. Berikut kutipan beritanya,

Tak ada wajah shock, tertekan, atau tegang. Wajah ayu itu terus tersenyum saat digiring dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi menuju rumah tahanan yang terletak di lantai basement gedung itu. (Kompas, 28 April 2012, hal 2)

Dalam kutipan berita di atas Kompas seolah mengingatkan pembaca bahwa sang pelaku korupsi adalah seorang perempuan cantik, mantan Putri Indonesia yang sangat terjaga perilakunya. Untuk sesaat Kompas tampak keluar dari *style* pemberitaannya selama ini yang cenderung konvensional, hati-hati, dan formal. Perhatikan kutipan berita berikut ini,

Dengan balutan baju warna putih, celana panjang hitam dan bersepatu hak tinggi, Angie, demikian Angelina sering dipanggil, berjalan melewati tangga depan lobi gedung KPK. Kilatan lampu *flash* kamera pewarta foto menyiram rambut hitamnya yang dibiarkan tergerai. (Kompas, 28 April 2012, hal 2).

Kompas keluar dari *style* pemberitaannya selama ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan frame berita yang demikian, Kompas tampak ingin kembali menekankan bahwa tersangka korupsi adalah perempuan, cantik, dan *fashionable*. Kompas mendefinisikan masalah (*define problem*) dalam kasus ini adalah perempuan (Angie) telah melakukan korupsi.

Namun demikian Kompas menyebutkan dalam beberapa beritanya bahwa kasus ini tidak mungkin terjadi karena Angie sendiri, ada pihak-pihak lain yang turut terlibat. Senin, 30 April 2012, Kompas menurunkan berita *KPK Tawari Angie Kerja Sama, Pengungkap Kasus Korupsi Akan Mendapatkan Hadiah*. Secara implicit berita tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin sebuah rapat pembahasan anggaran hanya dihadiri oleh Angelina saja. Berikut kutipan beritanya,

Bambang berharap Angelina bisa menjadi *justice collaborator* karena ada informasi penting yang hanya diketahui Angelina. Hal itu menyangkut pembahasan-pembahasan di Komisi X DPR mengenai proyek beberapa kementerian. (Kompas, 30 April 2012)

Berita lain yang juga mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lain selain Angie muncul Sabtu, 5 Mei 2012, *Telusuri Dana Angelina, Partai Demokrat Minta Angelina Ungkap Ketua Besar*. Penyebutan ketua besar, atau bos besar memperlihatkan bahwa kasus ini disebabkan oleh banyak pihak.

Kompas juga beberapa kali memunculkan pernyataan-pernyataan KPK maupun pengacara Angie, bahwa Angie adalah orang yang rasional. Dia akan bicara jujur dan apa adanya. Dalam berita di halaman 4, Rabu, 2 Mei 2012, *Angie Harus Ajukan Diri* Kompas memberitakan bahwa KPK tidak pernah menawarkan secara terbuka kepada Angie untuk menjadi *justice collaborator*, namun membiarkan Angie untuk memutuskan sendiri, karena menjadi *justice collaborator* harus berdasarkan pada kehendak sendiri. Secara implisit Kompas melakukan penilaian moral di sini (*make moral judgement*), bahwa KPK tidak boleh membuka peluang untuk memberi kelonggaran kepada Angie dengan berbagai bentuk penawaran.

Terkait dengan penanganan kasus Angie secara keseluruhan (*treatment recommendation*) Kompas tampak mengarahkan frame beritanya agar kasus ini ditangani secara *fair* oleh KPK. Kompas menyebutkan bahwa KPK tidak memberikan perlakuan yang istimewa kepada Angie. Saat penahanan berlangsung Angie dibawa jalan kaki melalui lobi depan gedung KPK, padahal KPK memiliki beberapa pintu masuk menuju rumah tahanan. Hal tersebut dipandang Kompas sebagai perlakuan yang sewajarnya diterima Angie selaku tersangka. Kompas juga menurunkan beberapa pernyataan pimpinan Partai Demokrat terhadap kasus Angelina Sondakh sebagai berikut:

Subur Budi Santoso (Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat):
Angie seharusnya berbicara sejujurnya tentang apa yang dia ketahui
Soetan Bathoegana (Ketua Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat):
Kita menyerahkan kepada proses hukum saja, silahkan Angie buka.
Ruhut Sitompul (Ketua departemen KOMunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat):
kami percayakan kepada KPK walaupun kami hormati praduga tak bersalah. Kami dorong KPK ungkap semuanya termasuk ketua dan bos besar
Andi Nurpati (Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat):
Kita doakan agar kasus hukumnya cepat selesai dan dituntaskan secara adil. (Kompas, Sabtu 5 Mei 2012)

Analisis framing Suara Merdeka

Berbeda dengan Kompas, Suara Merdeka adalah surat kabar yang sejak awal kelahirannya memang ditujukan untuk membawa suara rakyat yang baru merdeka. Visi tersebut mewujud dalam kebijakan redaksionalnya yang cenderung mengikuti selera pasar. Dalam kasus Angie, Suara Merdeka selama empat hari berturut-turut menjadikan peristiwa ini sebagai *headline*, yaitu 28 April 2012 dengan judul *Ditahan, Angie diawasi 24 jam*, 29 April 2012 *KPK Tak Berhenti di Angie*, 30 April 2012 *Angie Dijerat Dakwaan Kumulatif*, dan 1 Mei 2012 *Angie Dijanjikan Keringanan*. Hingga beberapa hari berikutnya Suara Merdeka masih mengangkat kasus Angie dalam beberapa pemberitaan di halaman depan, misal 2 Mei 2012 *KPK Yakin Anas Terlibat* (hal 1), 3 Mei 2012 *Harta Angie Belum Dibekukan* (hal 3), 4 Mei 2012 *KPK Kantongi Nama "Ketua Besar" Rekening Angie Dibekukan* (hal 1), dan 5 Mei 2012 *Justice Collaborator Tak Bisa Diterapkan pada Angie* (hal 3).

Penempatan kasus Angie sebagai *headline* tidak semata-mata karena media (Suara Merdeka) memberikan prioritas bahwa peristiwa ini penting untuk diperhatikan publik, melainkan karena media juga melihat bahwa Angie memiliki nilai berita sendiri di mata publik. Berbeda dengan kasus korupsi lain yang juga

melibatkan perempuan sebagai pelakunya, Angie adalah seorang *public figure*. Rasa ingin tahu masyarakat akan kasus ini jauh lebih tinggi dibanding dengan kasus lainnya. Disinilah sebenarnya kritik terhadap teori *agenda setting* muncul. Selalukah media yang menyusun agenda untuk publik atau sebaliknya, publik yang menentukan agenda media.

Sosok Angie yang seorang selebritis juga sering ditampilkan Suara Merdeka dalam foto-foto *full color* yang senantiasa menampilkan sosok Angie yang segar dengan senyumnya yang senantiasa mengembang sebagaimana foto yang menjadi ilustrasi berita *Angie Dilarikan Ke Rumah Sakit*, 2 Mei 2012. Foto itu menampakkan Angie yang turun dari mobil saat di bawa ke Rumah Sakit Perhati di Rutan Salemba. Sebutan Angie sebagai janda mendiang Adjie Massaid juga muncul dalam pemberitaan Suara Merdeka, termasuk Brotoseno sebagai pria yang disebut-sebut dekat dengan Angie.

Suara Merdeka mendefinisikan kasus ini sebagai kasus korupsi yang telah menyeret Angelina Sondakh sebagai salah satu pelakunya. Angie disebut telah menerima suap dalam pembahasan anggaran Wisma Atlet Sea Games dan juga menerima suap dalam pembahasan anggaran kemendiknas dalam pengadaan alat laboratorium di sejumlah universitas. Namun demikian, Suara Merdeka beberapa kali menurunkan berita bahwa Angie tidak sendiri dalam kasus ini, *headline* Suara Merdeka, Minggu 29 April 2012, *KPK Tak Berhenti di Angie* menyiratkan bahwa Angie hanyalah salah satu dari sejumlah nama lain yang terlibat dalam kasus ini. Demikian juga dengan headline Rabu, 2 Mei 2012 *KPK Yakin Anas Terlibat* semakin menguatkan frame bahwa Angie bukan penyebab satu-satunya.

Suara Merdeka juga beberapa kali menurunkan berita tentang penanganan kasus Angie termasuk kemungkinan Angie menjadi *justice collaborator*. Dengan menjadi *justice collaborator*, Angie dijanjikan akan mendapat keringanan hukuman.

Namun demikian Suara Merdeka juga cenderung mengarahkan frame pemberitaannya agar penanganan kasus Angie dilakukan secara objektif. Menjadikan Angie sebagai *justice collaborator* dipandang sebagai langkah mundur dari KPK. Emerson Yuntho (SM, 2 Mei 2012) menyebutkan bahwa “jika tersangka Angie bersedia menjadi *justice collaborator* maka hal itu akan menguntungkan anggota Komisi X DPR dari Partai Demokrat itu”. Namun, Suara Merdeka kemudian menurunkan pernyataan Kabiro Humas KPK Johan Budi SP bahwa KPK tidak akan membujuk Angie untuk menjadi *justice collaborator*. Dalam terbitan Sabtu 5 Mei 2012 hal 3, Suara Merdeka menurunkan berita *Justice Collaborator Tak Bisa Diterapkan pada Angie*. Berita tersebut juga diberi penutup pernyataan presiden terkait kasus ini. Berikut kutipan beritanya,

Terpisah, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta proses penegakan hukum terhadap Angie dijalankan dengan objektif. Sama seperti kasus kader Partai Demokrat lain, SBY tak akan memihak.

“Sikap presiden terhadap kasus hukum yang berkaitan dengan siapapun, individu, tetap sama, tidak berubah, tidak memihak, tidak pandang bulu,” kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha. (Suara Merdeka, Sabtu 5 Mei 2012)

Kesimpulan

1. Kompas dan Suara Merdeka mengkonstruksi kasus ini sebagai kasus korupsi yang melibatkan Angie sebagai tersangkanya. Namun Angie bukanlah penyebab satu-satunya dari terjadinya kasus ini. Kompas dan Suara Merdeka juga senada di dalam memberikan penilaian moral bahwa Angie orang yang rasional, harus jujur, dan kooperatif. Kompas dan Suara Merdeka juga sama-sama merekomendasikan agar kasus ini ditangani secara obyektif oleh KPK.

2. Dalam merepresentasikan sosok tersangka, Kompas dan Suara Merdeka tetap memberikan penonjolan yang berbeda terhadap Angie sebagai perempuan dibanding dengan kasus korupsi lainnya. Melalui penggunaan foto, deskripsi penampilan, maupun name calling media secara tidak langsung telah mengingatkan pembaca terhadap stereotype gender yang selama ini dilekatkan kepada perempuan.
3. Kompas dan Suara Merdeka sama-sama merekomendasikan penanganan kasus Angie secara obyektif sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini media berperan besar dalam mengawal penanganan kasus korupsi agar dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Burton, Graeme. 2000. *Talking Television, an Introducing To The Study of Television*. New York: Oxford University Press Inc.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Elkis
- Setiansah, Mite. "Politik Media dalam Membingkai Perempuan, (Analisis Framing Pemberitaan Kasus Video Porno Yahya Zaini dan Maria Eva dalam Harian Umum Kompas dan Suara Merdeka)", *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 6, Nomor 2, Desember 2009